



## Pengaruh Kinerja Pendamping Sosial Dan Akurasi Data Terpadu Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tenggara

Abraham Beruatarin<sup>1)</sup>, Tehubijuluw Zacharias<sup>2)</sup>, Joseph Antonius Ufi<sup>3)</sup>

Universitas Pattimura, Jl. Ir. M. Putuhena Poka, Kota Ambon

Corresponding author: [abrahamberuatarin@gmail.com](mailto:abrahamberuatarin@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja pendamping sosial dan akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terhadap efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tenggara. Latar belakang penelitian berangkat dari berbagai permasalahan implementatif, seperti rendahnya kualitas pendampingan sosial, ketidaktepatan data penerima manfaat, serta tantangan geografis wilayah kepulauan yang berdampak pada akurasi data dan pengawasan program. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert kepada seluruh pendamping sosial PKH (55 orang) yang ditetapkan sebagai sampel melalui teknik sensus. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk mengukur pengaruh parsial dan simultan kedua variabel independen terhadap efektivitas program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pendamping sosial dan akurasi data DTKS berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan PKH. Akurasi data memiliki pengaruh yang lebih dominan, ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi dan signifikansi yang lebih tinggi. Secara simultan, kedua variabel menjelaskan 89,1% variasi efektivitas pelaksanaan PKH. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas pendamping sosial dan pemutakhiran data secara berkala untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mendukung keberhasilan implementasi program.

**Kata kunci:** Akurasi data, efektivitas program, kinerja pendamping sosial.

### Abstract

*This study aims to analyze the influence of social facilitator performance and the accuracy of the Integrated Social Welfare Data (DTKS) on the effectiveness of the Family Hope Program (PKH) implementation at the Social Affairs Office of Southeast Maluku Regency. The study is based on several implementation issues, including low-quality social facilitation, inaccurate beneficiary data, and geographical challenges in island regions that hinder monitoring and data validation. A quantitative approach with an associative method was employed. Data were collected using a Likert-scale questionnaire administered to all 55 PKH social facilitators, selected through a census sampling technique. Multiple linear regression was used to examine the partial and simultaneous effects of the independent variables on program effectiveness. The findings reveal that both social facilitator performance and DTKS accuracy significantly influence the effectiveness of PKH implementation. Data accuracy demonstrates a more dominant effect, as reflected in its higher regression coefficient and statistical significance. Simultaneously, the two variables explain 89.1% of the variance in program effectiveness. These results underscore the importance of improving facilitator capacity and conducting regular data updates to ensure accurate targeting and enhance program implementation outcomes.*

**Key words:** Data Accuracy, Facilitator Performance, Program Effectiveness.



## PENDAHULUAN

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program prioritas nasional dalam bidang perlindungan sosial yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2007. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan kronis dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan (Kementerian Sosial RI, 2021). Bantuan tersebut disalurkan dengan syarat penerima manfaat memenuhi kewajiban tertentu dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak. Sebagai instrumen kebijakan publik, PKH tidak hanya menjadi strategi redistribusi ekonomi, tetapi juga mekanisme peningkatan kapabilitas sosial-ekonomi keluarga miskin (Mardiasmo, 2018).

Dalam pelaksanaannya, PKH bergantung pada tata kelola yang efektif, akuntabel, dan partisipatif, terutama pada tingkat daerah yang menjadi ujung tombak implementasi kebijakan. Keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan di lapangan, termasuk kemampuan sumber daya manusia, kualitas pendampingan sosial, serta keakuratan data penerima manfaat (Wibawa & Pranadji, 2020). Di sinilah peran pendamping sosial menjadi sangat penting, karena mereka bukan hanya penyalur informasi, tetapi juga aktor strategis dalam proses edukasi, motivasi, dan kontrol sosial terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pendamping sosial PKH memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa KPM memahami hak dan kewajibannya, menjalankan komitmen sosial, serta memanfaatkan bantuan secara produktif. Namun pada kenyataannya, rendahnya partisipasi dan pemahaman KPM terhadap program ini masih menjadi persoalan yang signifikan. Kondisi ini diperburuk dengan keterbatasan jumlah pendamping sosial yang efektif, sehingga proses edukasi dan pengawasan tidak berjalan optimal. Kinerja pendamping sosial menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan program, karena mencakup kompetensi teknis, komunikasi, kemampuan memfasilitasi, integritas, serta konsistensi dalam melakukan kunjungan dan pendampingan (Sulistiyani & Tjahjono, 2019).

Dalam berbagai evaluasi kebijakan, sering kali ditemukan bahwa pelaksanaan PKH masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang mencolok adalah variabilitas kualitas kinerja pendamping sosial. Beberapa pendamping menunjukkan dedikasi dan kapasitas tinggi, sementara yang lain cenderung pasif, kurang memahami tugas, atau tidak optimal dalam membina KPM (Saputri, 2022). Hal ini bisa disebabkan oleh beban kerja yang tinggi, insentif yang tidak memadai, kurangnya pelatihan, hingga minimnya supervisi dari instansi terkait (Nurjanah, 2021).

Masih terdapat masalah terkait komitmen dari penerima manfaat, seperti penyalahgunaan bantuan yang tidak sesuai tujuan, serta lemahnya tanggung jawab sosial yang seharusnya menyertai penerimaan manfaat. Masalah ini diperparah oleh persoalan administratif, seperti data yang tidak valid atau ganda, yang menghambat efektivitas distribusi bantuan.

Masalah serius lainnya yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan PKH adalah akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan utama dalam penentuan sasaran penerima manfaat. DTKS merupakan basis data yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial untuk memuat informasi rumah tangga miskin dan rentan, yang digunakan oleh berbagai program bantuan sosial. Sayangnya, dalam banyak kasus, data penerima PKH yang tercantum dalam DTKS tidak lagi sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Ketidaksesuaian ini seringkali mengakibatkan keluarga yang telah mampu masih tercantum sebagai penerima, sementara keluarga miskin yang layak tidak terdata (Suharto, 2020).

Di Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai wilayah kepulauan dengan karakteristik geografis yang cukup kompleks, persoalan akurasi data dan efektivitas pendampingan menjadi lebih menantang. Keterbatasan infrastruktur, konektivitas digital, serta distribusi penduduk yang tersebar di banyak pulau menyebabkan proses pendataan dan pendampingan membutuhkan upaya ekstra (BPS Maluku Tenggara, 2023). Tidak jarang ditemukan kasus di mana data penerima bantuan tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, seperti keluarga yang telah sejahtera masih terdaftar sebagai penerima manfaat, sementara keluarga miskin yang baru tidak terdata.

Fenomena ketidaktepatan data ini tidak hanya berdampak pada ketidakadilan distribusi bantuan, tetapi juga mencoreng kredibilitas pemerintah daerah dalam mengelola program sosial.



Masyarakat menjadi skeptis terhadap validitas kebijakan yang dijalankan, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak tujuan utama program, yakni pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat miskin secara berkelanjutan (Dwiyanto, 2018).

Efektivitas pelaksanaan PKH tidak bisa dilepaskan dari sinergi antara dua aspek utama: kinerja pendamping sosial dan akurasi data terpadu. Ketika kedua komponen ini berjalan secara optimal, maka program dapat mencapai tujuannya secara maksimal. Sebaliknya, jika salah satunya lemah, maka efektivitas pelaksanaan akan terganggu, bahkan dapat menciptakan efek negatif berupa ketergantungan, manipulasi data, atau konflik sosial di masyarakat (Widodo, 2020).

Meskipun Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Sosial telah melakukan berbagai upaya perbaikan, seperti pembaruan data secara berkala dan pelatihan bagi pendamping sosial, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa permasalahan masih terus muncul. Hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan tidak cukup hanya dilakukan secara administratif, tetapi perlu didukung dengan kajian akademik yang mendalam dan berbasis data (Riyadi, 2021).

Penelitian ini menjadi penting dan relevan, mengingat PKH merupakan program jangka panjang yang tidak hanya bersifat bantuan tunai, tetapi juga membangun ketahanan sosial keluarga. Dengan mengkaji dua variabel utama tersebut, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy) bagi pemerintah daerah, khususnya dalam peningkatan kapasitas SDM dan validasi data sosial (Bardach & Patashnik, 2019).

Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan sosial di daerah. Dengan pendekatan kuantitatif, studi ini akan memberikan gambaran yang terukur mengenai kekuatan hubungan antara kinerja, data, dan efektivitas pelaksanaan program, sehingga dapat menjadi referensi dalam perbaikan tata kelola program sosial lainnya (Osborne, 2010).

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berorientasi pada pengukuran pengaruh antar variabel secara objektif dan terukur melalui analisis statistik. Dalam konteks penelitian ini, variabel yang dianalisis adalah kinerja pendamping sosial dan akurasi data terpadu (DTKS) sebagai variabel independen, serta efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai variabel dependen. Penggunaan metode kuantitatif memungkinkan peneliti menguji hipotesis yang dibangun dari teori-teori relevan, sekaligus menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasi pada konteks yang lebih luas. Melalui instrumen berupa kuesioner terstandar, data numerik diperoleh secara sistematis sehingga setiap variabel dapat diukur secara konsisten, objektif, dan valid.

Pendekatan asosiatif digunakan untuk mengkaji hubungan dan pengaruh antara variabel-variabel yang diteliti. Pendekatan ini tepat karena fokus penelitian adalah mengetahui bagaimana kinerja pendamping sosial dan akurasi data DTKS memengaruhi efektivitas pelaksanaan PKH, baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian diharapkan memberi gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan program, serta menjadi dasar untuk memperbaiki tata kelola layanan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tenggara.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup berbasis skala Likert lima poin—mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Setiap variabel dijabarkan ke dalam sejumlah indikator yang kemudian dikembangkan menjadi item-item pernyataan untuk menggambarkan persepsi, sikap, dan pengalaman responden secara kuantitatif. Skala Likert digunakan karena mudah dipahami oleh responden, mampu memberikan variasi jawaban yang memadai, serta memudahkan peneliti melakukan analisis statistik. Data yang diperoleh melalui kuesioner dianggap valid untuk menggambarkan kondisi empiris terkait pelaksanaan PKH.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap utama. Pertama, penyebaran kuesioner kepada seluruh pendamping sosial PKH secara tatap muka untuk memastikan pemahaman responden. Kedua, pengumpulan kembali kuesioner yang telah diisi untuk memastikan

kelengkapan dan menghindari kehilangan data. Ketiga, tabulasi data menggunakan perangkat lunak seperti SPSS atau Microsoft Excel guna memudahkan proses analisis. Tabulasi dilakukan secara teliti untuk memastikan tidak ada data yang ganda, kosong, atau tidak konsisten.

Populasi penelitian ini adalah seluruh pendamping sosial PKH yang bertugas di Kabupaten Maluku Tenggara, berjumlah 55 orang berdasarkan data Dinas Sosial tahun 2025. Karena jumlah populasi relatif kecil dan memungkinkan dijangkau secara keseluruhan, penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh atau sensus. Dengan demikian, seluruh pendamping sosial PKH dijadikan responden untuk memperoleh gambaran yang utuh dan meningkatkan validitas hasil penelitian. Teknik ini mengurangi risiko bias dan kesalahan generalisasi, karena data mencakup seluruh anggota populasi yang relevan dengan penelitian.

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner, wawancara pendukung, dan observasi lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi Dinas Sosial, literatur akademik, jurnal ilmiah, laporan PKH, serta berbagai sumber lain yang relevan dengan penelitian.

Untuk memastikan kelayakan instrumen, dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas menggunakan korelasi Pearson Product Moment untuk melihat apakah setiap item mampu mengukur variabel yang dimaksud. Item dinyatakan valid apabila  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel pada tingkat signifikansi 0,05. Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan menggunakan Cronbach's Alpha. Instrumen dianggap reliabel apabila nilai alpha lebih besar dari 0,6, yang menunjukkan konsistensi internal antar item pernyataan.

Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda. Sebelum analisis regresi dilakukan, model diuji melalui uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Uji normalitas dilakukan dengan melihat histogram residual dan P-P Plot. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat pola sebaran titik pada scatterplot. Multikolinearitas diuji melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF), sedangkan autokorelasi diuji menggunakan nilai Durbin-Watson.

Setelah semua asumsi terpenuhi, dilakukan uji  $t$  untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, serta uji  $F$  untuk melihat pengaruh simultan. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk melihat sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nilai  $R^2$  yang tinggi menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan efektivitas PKH secara lebih baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. HASIL PENELITIAN

Analisis pertama dilakukan dengan melihat bagaimana kinerja pendamping sosial dan akurasi data terpadu memengaruhi efektivitas pelaksanaan PKH melalui uji regresi linear berganda. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh kedua variabel independen secara simultan. Hasil perhitungan regresi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1  
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Konstanta	1.580	0.899	–	1.759	0.085
Kinerja Pendamping Sosial	0.267	0.098	0.332	2.824	0.003
Akurasi Data Terpadu (DTKS)	0.591	0.110	0.629	5.360	<0.001

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kedua variabel independen memiliki koefisien positif dan signifikan. Artinya, semakin baik kinerja pendamping sosial dan semakin akurat data DTKS yang digunakan, semakin tinggi efektivitas pelaksanaan PKH. Koefisien DTKS (0.591) jauh lebih tinggi dibanding kinerja pendamping sosial (0.267), menunjukkan bahwa ketepatan data menjadi faktor yang lebih dominan dalam memengaruhi efektivitas program. Nilai signifikansi keduanya <0.05

mempertegas bahwa pengaruh tersebut secara statistik sangat meyakinkan.

Untuk memastikan pengaruh masing-masing variabel secara terpisah, dilakukan uji t. Uji ini membantu menjelaskan sejauh mana setiap variabel berperan terhadap efektivitas PKH ketika dianalisis sendiri-sendiri. Hasil uji t disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2  
Hasil Uji t (Parsial)

Variabel	T	Sig.
Kinerja Pendamping Sosial	2.824	0.003
Akurasi Data Terpadu (DTKS)	5.360	<0.001

Nilai t pada tabel menunjukkan bahwa masing-masing variabel berpengaruh signifikan. Kinerja pendamping sosial terbukti memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas PKH. Sementara itu, akurasi DTKS memiliki nilai t yang jauh lebih besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketepatan data merupakan unsur sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program. Kedua variabel membuktikan bahwa baik aspek manusia maupun aspek sistem memiliki peran sentral.

Selain pengujian parsial, pengaruh kedua variabel juga diuji secara simultan melalui uji F. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah kinerja pendamping sosial dan akurasi DTKS secara bersama-sama dapat menjelaskan efektivitas PKH dalam satu model regresi. Hasilnya ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 3  
Hasil Uji F (Simultan)

Model	F Hitung	Sig.
Regresi	211.880	<0.001

Berdasarkan hasil uji F, model regresi terbukti signifikan secara simultan. Nilai F yang sangat tinggi (211.880) menunjukkan bahwa kinerja pendamping sosial dan akurasi DTKS secara bersama-sama memberikan pengaruh kuat terhadap efektivitas PKH. Nilai signifikansi <0.001 memperkuat kesimpulan bahwa kedua variabel bekerja secara kolektif dalam membentuk efektivitas pelaksanaan program. Model ini dapat dinyatakan layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antarvariabel penelitian.

Selanjutnya, koefisien determinasi dihitung untuk mengetahui seberapa besar kontribusi kedua variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai ini menggambarkan seberapa besar variasi efektivitas PKH yang dapat diterangkan oleh model regresi. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4  
Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error
0.944	0.891	0.886	1.210

Nilai R Square sebesar 0.891 menunjukkan bahwa 89,1% variasi efektivitas PKH dapat dijelaskan oleh kinerja pendamping sosial dan akurasi DTKS. Angka ini sangat tinggi, yang berarti model regresi memiliki kekuatan prediktif yang kuat. Adjusted R Square yang mendekati nilai tersebut menandakan bahwa model ini stabil dan tidak mengalami overfitting. Dengan demikian, kedua variabel independen dalam penelitian memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap efektivitas program.



## 2. PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pendamping sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas Program Keluarga Harapan. Pendamping sosial menjadi pihak yang berinteraksi langsung dengan keluarga penerima manfaat, sehingga kualitas pendampingan, kemampuan komunikasi, serta ketepatan dalam memberikan arahan sangat menentukan keberhasilan program. Ketika pendamping bekerja dengan profesional dan responsif, pelaksanaan PKH dapat berjalan lebih terarah dan mendukung perubahan perilaku positif pada keluarga penerima manfaat.

Selain itu, akurasi DTKS terbukti memberikan pengaruh besar terhadap efektivitas pelaksanaan PKH. Data yang akurat merupakan fondasi utama agar bantuan tepat sasaran. Ketidakkakuratan data berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam seleksi penerima, baik dalam bentuk penerima yang tidak layak maupun keluarga miskin yang tidak terdaftar. Temuan ini memperteguh pentingnya pemutakhiran data secara berkala sebagai bagian integral dari keseluruhan mekanisme pelaksanaan program.

Pengaruh simultan kedua variabel juga memperlihatkan hubungan yang saling melengkapi. Kinerja pendamping sosial membutuhkan dukungan data yang valid, sedangkan akurasi data membutuhkan verifikasi lapangan dari pendamping sosial. Sinergi ini menghasilkan pelaksanaan program yang lebih efektif karena masing-masing variabel saling memperkuat. Pendamping yang kompeten dapat mengonfirmasi data dan memberikan laporan lapangan, sementara data yang akurat membantu pendamping menentukan strategi pendampingan yang tepat.

Temuan ini juga sejalan dengan pendekatan teori sistem, yang menjelaskan bahwa suatu program akan berjalan efektif jika setiap komponen di dalamnya berfungsi dan saling terhubung secara harmonis. Dalam konteks PKH, sistem data (input) dan proses pendampingan (proses) sama-sama menentukan hasil akhir berupa efektivitas program. Jika salah satu komponen tidak optimal, maka pelaksanaan program secara keseluruhan akan terpengaruh.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bahwa peningkatan efektivitas PKH perlu dilakukan melalui dua jalur penting: penguatan kapasitas pendamping sosial serta peningkatan kualitas data terpadu. Pendamping sosial memerlukan pelatihan berkelanjutan, terutama dalam hal pemahaman kebijakan, pendekatan komunikasi, dan kemampuan analisis data. Sementara itu, pemutakhiran DTKS harus melibatkan koordinasi lintas pihak, mulai dari pemerintah desa hingga Dinas Sosial. Perpaduan keduanya akan menghasilkan pelaksanaan PKH yang lebih akuntabel, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

## SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tenggara dipengaruhi secara signifikan oleh dua faktor utama, yaitu kinerja pendamping sosial dan akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kinerja pendamping sosial yang baik terbukti meningkatkan kemampuan keluarga penerima manfaat dalam memahami kewajiban program, mematuhi komponen kepesertaan, serta berpartisipasi aktif dalam proses pendampingan. Pendamping yang mampu menjalankan tugas secara profesional, komunikatif, dan responsif memberikan dampak positif terhadap keberhasilan implementasi PKH. Di sisi lain, akurasi DTKS memiliki pengaruh yang lebih dominan karena data yang valid memungkinkan bantuan diberikan tepat sasaran, meminimalkan kesalahan penerima, dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan program. Ketepatan data yang tinggi juga memberikan dasar yang kuat bagi pendamping untuk melakukan verifikasi dan pengambilan keputusan yang lebih tepat di lapangan. Secara simultan, kedua variabel tersebut terbukti mampu menjelaskan sebagian besar variabel efektivitas PKH, sehingga keduanya merupakan komponen penting dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Peningkatan kapasitas pendamping sosial perlu mendapatkan prioritas melalui pelatihan yang berkelanjutan, terutama pada aspek komunikasi, pemahaman kebijakan PKH, dan pemanfaatan teknologi. Pendamping yang memiliki kompetensi lebih baik akan mampu menjalankan tugas secara optimal.



Selain itu, proses pemutakhiran dan validasi DTKS harus dilakukan secara konsisten dengan melibatkan pemerintah desa, operator data, dan masyarakat agar kualitas data semakin akurat. Sinergi antara pendamping sosial dan pengelola data juga perlu diperkuat melalui mekanisme koordinasi yang lebih efektif dan sistem informasi yang terintegrasi. Upaya memperkuat dukungan kebijakan serta penyediaan fasilitas yang memadai menjadi langkah penting untuk memperlancar pelaksanaan program secara berkelanjutan. Dengan meningkatkan kualitas pendampingan dan memastikan akurasi data, efektivitas pelaksanaan PKH dapat terus ditingkatkan sesuai tujuan program.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2019). *A practical guide for policy analysis: The eightfold path to more effective problem solving* (6th ed.). CQ Press.
- BPS Maluku Tenggara. (2023). *Maluku Tenggara dalam angka 2023*. Badan Pusat Statistik.
- Dwiyanto, A. (2018). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Kementerian Sosial RI. (2021). *Pedoman umum Program Keluarga Harapan*. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.
- Mardiasmo. (2018). *Kebijakan publik: Proses dan analisis*. CV Andi Offset.
- Nurjanah, S. (2021). Analisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan: Peran pendamping dalam meningkatkan efektivitas program. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 145–158.
- Osborne, S. P. (2010). *The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. Routledge.
- Riyadi, S. (2021). Evaluasi implementasi dan pemutakhiran data kesejahteraan sosial di daerah. *Jurnal Administrasi Sosial*, 9(1), 55–67.
- Saputri, L. (2022). Kinerja pendamping sosial dalam implementasi Program Keluarga Harapan. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 4(3), 210–222.
- Suharto, E. (2020). *Kebijakan sosial: Pendekatan, teori dan analisis*. Alfabeta.
- Sulistiyani, A. T., & Tjahjono, H. (2019). Kinerja pendamping sosial dan dampaknya terhadap efektivitas program perlindungan sosial. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 17(1), 33–48.
- Widodo, J. (2020). *Analisis kebijakan publik*. Bayumedia Publishing.
- Wibawa, S., & Pranadji, D. (2020). Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di daerah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 5(1), 25–39.